

## PERSATUAN ISLAM (PERSIS) PADA MASA KONTEMPORER, 1945-2015

Oleh : Dudung Abdurahman

Persatuan Islam atau Persis dikenal dalam sejarah Islam di Indonesia sebagai gerakan sosial-keagamaan yang bersifat puritan. Pembaruan Islam yang diarahkan kepada upaya-upaya pemurnian itu dikembangkan Persis dalam masalah akidah, ibadah, muamalat, dan sosial-politik. Corak pembaruan Islam seperti ini hampir baku atas gagasan dan rintisan para tokoh Persis sejak berdirinya (1923) hingga periode awal kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, gerakan Persis pada masa kontemporer lebih berkembang dengan pola gerakannya pada masa lalu tersebut, kecuali gagasan, institusi, dan orientasi pembaruan yang disesuaikan dengan situasi sosial-politik yang berkembang dewasa ini. Hal ini menjadi alasan untuk mengaji kelangsungan dan perubahan gerakan Persis dalam kurun waktu 1945-2015.

### A. Pendahuluan

Kajian tentang gerakan-gerakan Islam pada masa kontemporer, sebagaimana tema utama buku ini menarik dilakukan, dengan alasannya antara lain : 1) karya-karya ilmiah dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan tentang gerakan ataupun organisasi keagamaan (Islam) lebih banyak menyangkut pertumbuhan serta perkembangannya pada awal hingga pertengahan abad XX. Padahal 2) meskipun disebutkan oleh Deliar Noer bahwa perkembangan gerakan keislaman, khususnya melalui organisasi-organisasi pembaru sesudah Indonesia merdeka menunjukkan gejala historisnya yang tidak banyak berbeda dengan periode sebelum kemerdekaan. Namun pendapat tersebut masih bisa disanggah, karena secara historis setiap periode sejarah merupakan indikator perubahan yang bersifat *diakronik*, termasuk perkembangan dan gerakan keislaman di Indonesia dewasa ini.

Seperti halnya yang akan dibahas dalam artikel ini tentang Persatuan Islam, selintas sejarah organisasi reformis dan puritanis ini seakan hanya mengembangkan pemikiran serta usaha-usaha A. Hassan dan para tokoh segenarisanya yang mencirikan perkembangan Persis pada periode kontemporer. Namun anggapan inipun masih bisa disanggah dengan alasan, bahwa setidaknya sejak periode Orde Baru dengan suasana politik dan isu-isu pembangunan yang dikembangkan pemerintah pada masanya telah banyak mempengaruhi orientasi gerakan-gerakan Islam, termasuk Persis. Demikian pula era Reformasi Indonesia dengan perubahan berbagai dimensi kehidupan bangsa

yang sangat massif juga telah mempengaruhi pola-pola gerakan keagamaan seperti Persis ini.

Oleh karena itu, artikel ini ingin memfokuskan pembahasan serta analisis terhadap perkembangan kontemporer Persatuan Islam, dengan pokok-pokok bahasannya di sekitar bidang-bidang yang menjadi watak gerakan organisasi ini sejak awal berdirinya, yaitu : pemikiran keagamaan, orientasi sosial-politik, dan gerakan pendidikan dan dakwah. Bagaimana dan mengapa masalah-masalah tersebut mengalami perubahan dan menunjukkan kekhasan gerakan Persis? Pembahasannya dalam artikel ini dilakukan berdasarkan metodologi sejarah.

## **B. Pemikiran Keagamaan**

Persatuan Islam (Persis) semenjak berdirinya pada tahun 1923, lebih dikenal sebagai organisasi pembaruan Islam, dibanding ormas lainnya, yang sangat getol dengan seruan kembali kepada Alquran dan hadis, terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah. Tema utama pembaruan Persis ini dikembangkan dalam perjuangannya kepada dua arah. *Pertama*, kepada internal umat Islam, khususnya kalangan Persis untuk terus berjuang membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan Alquran dan hadis. *Kedua*, kepada eksternal umat Islam, terutama para pihak yang dianggap melakukan gerakan anti Islam, Persis mengembangkan perjuangannya untuk menentang dan melawan setiap aliran serta gerakan tersebut di Indonesia (Anshori, 1958: 6 dan Noer, 1985: 95).

Pengembangan pemikiran keagamaan Persis tersebut, untuk masa-masa awal lebih bertumpu kepada pemikiran dan karya-karya Ahmad Hasan. Dia merupakan guru utama Persis yang berhasil mencetak kader-kader yang melanjutkan perjuangannya. (Abdurahman, 2019: ). Meskipun A. Hassan tidak pernah menjadi pengurus eksekutif dalam organisasi ini, seperti halnya pada masa kemerdekaan Indonesia Persis dipimpin oleh Isa Anshari (1916-1969) sebagai ketua umum, sejak tahun 1948 sampai tahun 1960. Selama kepemimpinannya itu, A. Hassan tetap menjadi tokoh dan guru utama Persis. Bahkan semenjak awal gerakan ijtihad, Persis banyak memecahkan berbagai macam persoalan hukum Islam di masyarakat, seperti masalah ibadah dan mu'amalah, selalu dalam kendali A. Hassan melalui bukunya berjudul *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, 3 jilid (Hassan, 1980). Selama itu pula Persis belum memiliki lembaga

pembahasan hukum yang otonom, sehingga pemikiran dan fatwa-fatwa A. Hassan masih tetap sebagai rujukan dan pegangan warga Persis.

Baru kemudian, berhubung A. Hassan sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan, pada Mukhtar Persis Keenam, tanggal 15-18 Desember 1956, disepakati pembentukan Majelis Ulama Persis. Tercatat sebagai anggota Majelis Ulama ini adalah : Ahmad Hassan, K.H.E. Abdurrahman, Munawwir Cholil, dan Abdul Qodir Hassan, putra sulung A. Hassan (Anas, 2000: 174). Adapun status serta peranan Majelis Ulama ini, sebagaimana dijelaskan dalam *Qanun Asasi* Persis tahun 1957, Bab IV Pasal 1, antara lain sebagai berikut : 1) Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan Persis, dengan cara bekerjanya yang diatur dalam kaidah Majelis Ulama 2) Bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar Alquran dan Sunnah, yang hasilnya kemudian disiarkan oleh Pusat Pimpinan Persis, 3) Sebagai *waratsatul anbiya'*, Majelis Ulama mempunyai hak veto (menolak dan membatalkan) atas segala keputusan dan langkah yang diambil oleh organisasi Persatuan Islam (Persis, 1957: 35).

Produk pemikiran Majelis Ulama Persis tidak banyak diketahui secara langsung, kecuali hasil-hasil pembahasan atau pengembangan atas karya-karya A. Hassan. Bahkan pengembangan demikian lebih banyak dilakukan oleh Abdul Qadir Hassan (1914-1984), sehingga dinamika Majelis Ulama tersebut juga tidak terlepas dari peranan putra sulung A. Hassan ini (Abbas, 2016:4).

Dalam Mukhtar Kedelapan Persis pada tahun 1983, Majelis Ulama diubah namanya menjadi Dewan Hisbah. Sebagaimana disebutkan dalam *Qanun Asasi* Persis, Bab II, Pasal 8, bahwa “Dewan Hisbah berkewajiban membantu Pusat Pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota Jam’iyyah” (Amin, 2005: 155). Dengan demikian, tugas utama Dewan Hisbah sebagai aparat Pimpinan Pusat Persis adalah mengemban amanat untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan keputusan hukum. Dewan Hisbah juga berperan sebagai pengawas pelaksanaan hukum di kalangan anggota Persis, dan bertanggungjawab dalam setiap kinerja dan keputusan-keputusan hukum yang difatwakan (Abbas, 2016:6).

Dewan Hisbah secara struktural terdiri dari tiga komisi sebagai berikut: 1) *Komisi Ibadah*, yang bertugas menyusun konsep-konsep serta petunjuk pelaksanaan ibadah

praktis, untuk dijadikan pegangan bagi anggota Persis; 2) *Komisi Mu'amalah*, yang bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan langsung komisi ini maupun atas masukan dari komisi lain dan masyarakat umum, dan 3) *Komisi Aliran Sesat*, yang bertugas melakukan penelitian dan pembahasan tentang aliran-aliran keagamaan yang dipandang sesat dan muncul di masyarakat (*Ibid.*, 5).

Hasil kajian Dewan Hisbah Persis, antara lain dapat ditelaah dari tahun 1996-2009. Sebagian produk hukum dewan ini merupakan hasil revisi terhadap hasil-hasil pembahasan sebelumnya atau ketetapan-ketetapan lama, tetapi secara umum tetap menunjukkan jawaban atau pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek *ibadah* dan *mu'amalah* (*Ibid.*, 8). Masalah-masalah yang berkenaan dengan ibadah selalu dilakukan dengan pengkajian ulang terhadap hasil ijtihad para tokoh Persis terdahulu, misalnya buku A.Hassan, *Pengajaran Shalat, Soal Jawab*; dan buku *Kata Berjawab* karya 'Abd. al-Qadir Hassan. Produk hukum tentang ibadah, antara lain: hukum salat dengan dua bahasa, hukum salat Jum'at bagi musafir, dan mengangkat tangan ketika berdoa. Demikian halnya dengan mu'amalah, Dewan Hisbah melakukan kajian atas berbagai permasalahan hukum sesuai perubahan dan perkembangan ilmu hukum. Produk ijtihad dalam bidang ini, antara lain tentang posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris non muslim (*Ibid.*, 9).

Selain Dewan Hisbah, terdapat lembaga lain yang dikembangkan untuk menopang peranan Persis dalam kajian-kajian keislaman dan sosial. Di antaranya adalah *Majlis Tafkir* yang berfungsi sebagai forum pemikir untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan organisasi; *Majelis Tarbiyah* yang bertugas mengembangkan pengkajian dan memberikan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip serta strategi pendidikan dan dakwah; *Dewan Hisab dan Rukyat*, yang berperan membahas penentuan kalender Islam; dan *Lajnah Bantuan Hukum Persis* untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat (Anas, 1997:11-12).

### **C. Orientasi Sosial-politik**

Pembahasan berikut ini, secara kronologis akan dikemukakan dan dianalisis tentang kecenderungan sosial-politik Persis menjelang kemerdekaan Indonesia hingga dewasa ini. Persis memang bukan organisasi politik, tetapi dalam kiprah organisasinya banyak

menunjukkan peranan sosial-politik, khususnya keterlibatan dalam kepartaian Islam dalam percaturan politik Indonesia.

Pada fase menjelang kemerdekaan, para tokoh Persis mulai tertarik dengan masalah-masalah politik. Hal ini didasarkan pada anggapan mereka bahwa kembali kepada Alquran dan Sunnah bukan hanya menyangkut masalah-masalah aqidah dan ibadah saja, melainkan lebih luas lagi berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan politik, termasuk juga politik untuk memperjuangkan ideologi Islam (Anshory, 1958: 24). Sementara itu, kalangan Persis sendiri berperanan aktif dalam usaha-usaha politik umat Islam berhadapan dengan politik golongan nasionalis sekuler yang dipimpin oleh Soekarno beserta ide-ide politiknya (Noer, 1987: 6).

Pertentangan atau polemik antara dua golongan tersebut tampak lebih tajam karena masing-masing berkeinginan untuk mendudukkan ideologinya setelah Indonesia merdeka. Dalam masalah kenegaraan misalnya, Soekarno menawarkan pemisahan agama dari negara seperti yang dilakukan Kamal Attaturk di Turki. Menurutnya, pemisahan agama dari negara secara formal, tidaklah berarti menjauhi sama sekali urusan-urusan keagamaan (Islam) dari kehidupan warga negara, sebab rakyat akan dapat memasukkan ajaran-ajaran Islam itu dalam sikap dan kebijaksanaan politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (Soekarno, 1965:407). Sementara itu, pandangan umum kalangan Persis terhadap gagasan Soekarno tersebut menunjukkan suatu refleksi jawab terhadap pandangan yang diberikan kalangan nasionalis sekuler.

Demikian pula terhadap gagasan Soekarno yang mengharapkan adanya proses sosialisasi nilai-nilai Islam, dan pemeluk Islam sendiri dapat menyadari sepenuhnya akan arti ajaran-ajarannya, maka negara atau masyarakat dengan serta merta akan memihak kepada Islam. Akan tetapi gagasan seperti itu dirasa oleh umat Islam, khususnya Persis, sebagai suatu kondisi yang jauh dari harapan, sebab sikap anti Islam masih cukup kuat. Oleh karena itu, perjuangan untuk merealisasikan nilai-nilai Islam justru menuntut adanya konsolidasi bagi pelaksanaan syariat agama, sehingga Persis menempuh langkah aktif dalam politik praktis. Sejak muktamar umat Islam pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945 di Yogyakarta, tokoh-tokoh Persis memulai kiprah politiknya dalam Masyumi, satu-satunya partai politik umat Islam Indonesia ketika itu hasil muktamar tersebut.

Kiprah politik Persis pada awal kemerdekaan bisa dikatakan identik dengan politik Masyumi. Karena sejak Persis berdiri kembali secara resmi pada tahun 1948,

organisasi ini merupakan anggota istimewa partai Masyumi, dan seluruh anggota Persis dianjurkan memasuki partai ini. Dua tokoh Persis, Mohammad Natsir dan Isa Anshary, juga terpilih sebagai anggota pimpinan Masyumi Pusat (Mughni, 1980:85). Semangat serta usaha Persis untuk berkiprah dalam politik tersebut ditegaskan dalam Manifesto Perjuangan Persis 1956, yaitu hasil putusan Mukhtamar Keenam, 15-18 Desember 1956, yang secara garis besar dinyatakan bahwa "Persis semenjak berdirinya semenjak berdirinya bersemboyan hendak mengembalikan umat Islam kepada pimpinan Alquran dan Sunnah, maka usaha-usaha yang dilakukan organisasi ini bukan saja terbatas dalam dakwah bidang aqidah dan ibadah saja, melainkan juga berjuang dalam politik serta ideologi Islam (Anshary, 1958:24).

Manifesto Persis tersebut juga merupakan puncak dari pertentangan kalangan Islam dengan golongan nasionalis yang terwakili dalam pikiran-pikiran Soekarno. Dalam hal ini, meskipun Pimpinan Persis mendukung kepemimpinan Republik Indonesia di tangan nasionalis sekuler, khususnya Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dua tokohnya: Isa Anshary dan A. Hassan terus memperjuangkan agar negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini juga ditegaskan oleh Isa Anshary, bahwa partisipasi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan itu semata-mata untuk "membangun negara dalam keridhaan Allah dan memenuhi tanggung jawab sebagai umat Islam" (Anshary, 1954: 59-60). Semangat perjuangan politik Persis dikembangkan lebih lanjut melalui Dewan Konstituante sejak dibentuknya pada tahun 1956. Mereka memandang Dewan Konstituante merupakan sarana untuk memperjuangkan prinsip Islam sebagai falsafah negara. Demikian pula cita-cita mendirikan negara Islam dapat dicapai melalui demokrasi dalam negara Republik Indonesia (Federspiel, 1970: 166).

Kiprah politik lainnya yang ditampilkan kalangan Persis pada masa Orde Lama adalah reaksi mereka terhadap komunisme dan gerakan politiknya. Dalam manifesto politik yang dikeluarkan Pusat Pimpinan Persis pada tanggal 4 Maret 1957, yang ditandatangani oleh K.H.M. Isa Anshary sebagai Ketua Umum dan KHE. Abdurrahman sebagai Sekretaris Umum, dinyatakan bahwa teori dan praktek komunis bukan saja bertentangan dengan semua agama, tetapi komunisme juga mengandung permusuhan dan pertentangan dengan keyakinan yang diajarkan oleh semua agama. Manifesto tersebut sekaligus merupakan penolakan Persis terhadap kebijakan Bung Karno yang ingin memasukkan komunis dalam pemerintahan Republik Indonesia. Sikap tegas Persis

terhadap komunisme tersebut juga diarahkan kepada pengikutnya. Berdasarkan hasil konferensi ulama Persis pada tanggal 9 November 1954 di Bandung, dideklarasikan fatwa bahwa setiap muslim yang telah mengetahui kebatilan komunisme dan nasionalisme sekuler tetapi ia tetap mengikuti konsep dan kegiatan politiknya, maka ia dianggap murtad dan apabila ia meninggal dunia tidak perlu disalatkan dan dimakamkan secara Islam (Anas, 2015: 132).

Perlawanan terhadap komunisme juga dilakukan Pemuda Persis. Organisasi otonom Persis ini berupaya menghadapi dan membendung komunisme di Indonesia dengan mengerahkan para mubalig muda dalam berbagai kegiatan dakwah. Mereka melakukan tablig keliling tanpa secara langsung membawa nama organisasi Persis ke daerah-daerah yang berbasis pengaruh PKI. Karena itu, kegiatan dakwah mereka dikenal dengan sebutan “mubalig liar” atau “mubalig amatir”. Gerakan dakwah Pemuda Persis seperti itu dilakukan secara dinamis serta mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga masyarakat menaruh perhatian dan simpati yang positif (*Ibid.*, 134).

Selanjutnya, kiprah sosial-politik Persis pada periode Orde Baru ditunjukkan dengan sikap akomodatif mereka terhadap kepemimpinan Soeharto. Persis menyambut baik atas kebijakan politik Soeharto yang berusaha merehabilitasi Masyumi, yang dilakukan dengan membentuk Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tanggal 7 April 1967. Indikasi Parmusi didirikan sebagai kelanjutan Masyumi pada mulanya Pemerintah Orde Baru sendiri menyetujui partai tersebut dipimpin oleh para mantan pemimpin Masyumi. Akan tetapi beberapa perwira tentara keberatan atas keikutsertaan tokoh-tokoh Masyumi dalam Parmusi, maka pada tanggal 24 Oktober 1967 Mohammad Natsir mengundurkan diri dari pimpinan Parmusi (Boland, 1985:158-159). Setelah itu kemudian Parmusi dipimpin oleh Djarnawi Hadikusuma sebagai Ketua Umum dan Lukman Harun sebagai Sekretaris Jenderal dalam masa bhakti 1968-1970 (Aly, 1985: 229). Akibatnya, Persis menunjukkan sikap yang kurang responsif terhadap Parmusi, karena mereka juga beralasan bahwa pimpinan partai ini tidak dipilih oleh umat (Sar'an, 1988:11).

Semenjak itu Persis menegaskan arah perjuangannya sebagai organisasi non-politik. Perhatian Persis selanjutnya lebih diarahkan kepada usaha-usaha merespons masalah-masalah sosial, khususnya berkaitan dengan aliran aliran yang dipandang menyesatkan umat Islam. Persis selalu memberikan pembahasan dan sorotan terhadap aliran dan gerakan Isa Bugis, Islam Jama'ah, Darul Hadits, dan Inkarus Sunnah. Dalam

menghadapi aliran-aliran seperti ini, para *mubalig* Persis dan *mubaligh* Persistri serta para da'i Pemuda Persis dan Jam'iyatul Banat juga seringkali melakukan tablig keliling ke daerah-daerah (Anas, 2015: 141).

Perkembangan sosial-politik Persis pada era Reformasi, secara garis besar dapat dilihat dari sikap dan kebijakan organisasi ini. Misalnya berkaitan dengan kepartaian, berdasarkan musyawarah Pusat Pimpinan Persis pada tanggal 22 Juli 1998, yang membahas sikap Persis tentang situasi politik dewasa ini, diputuskan antara lain: "Persis tetap istiqomah tidak akan menjadi partai politik dan tidak akan mendirikan partai politik" (*Ibid.*, 189). Meskipun demikian, keterlibatan perseorangan anggota Persis dalam keanggotaan atau kepengurusan partai politik tetap disetujui atau diakui sebagai hak dan sikap politik yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, ketika Partai Bulan Bintang (PBB) berdiri yang dianggap representasi Masyumi, maka Persis memberikan apresiasi atas kelahiran partai ini. Namun Persis secara organisatoris dan struktural tidak berusaha secara langsung menempatkan kader anggotanya dalam partai tersebut.

Dewasa ini, kecenderungan anggota Persis memang menyalurkan aspirasi politiknya kepada PBB, bahkan berkembang anggapan masyarakat umum bahwa Persis identik dengan partai politik Islam tersebut. Kecenderungan demikian juga didukung oleh emosi masa lampau dan bayangan jamaah Persis akan kegemilangan Partai Masyumi. Lambang partai PBB yang mirip dengan lambang Masyumi telah mengingatkan para tokoh dan generasi Persis untuk memberikan dukungan politiknya kepada PBB. Akan tetapi tanpa secara langsung merupakan efek dari partisipasi politik kepartaian seperti itu, tampaknya basis sosial-politik Persis itu juga memberikan dukungan kepada kader organisasi ini untuk mendapat kepercayaan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dibuktikan dengan ditetapkan KH. Drs. Shiddiq Amien, MBA., Ketua Umum Pusat Pimpinan Persis, menjadi Utusan Golongan Agama di MPR RI. masa bhakti 1999-2004 (*Ibid.*, 192).

Adapun perkembangan sosial Persis pada era reformasi ditunjukkan dengan peningkatan jumlah anggota organisasi serta pengembangan struktur organisasi ke luar wilayah Jawa Barat. Pada tahun 1995 anggota Persis yang ber-NPA (Nomor Pokok Anggota) tercatat sebanyak 10.604 orang. Kemudian sejak awal pertengahan tahun 2000 jumlah anggota mengalami peningkatan kuantitas yang sangat tinggi, dan keanggotaan Persis hingga kini tercatat sebanyak 23.245 orang. Jumlah ini bisa terhitung lebih banyak lagi bila ditambah anggota organisasi otonom: Persistri, Pemuda Persis,



Pemudi Persis, Himpunan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswi Persis, yang seluruh anggotanya sekitar 5000 orang. Keanggotaan Persis ini tersebar di 15 wilayah provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Adapun pengorganisasian Persis secara struktural meliputi: Perwakilan Pimpinan Pusat Persis dalam tiga koordinasi di DKI Jakarta, Sumatera Bagian Utara, dan Bagian Timur Indonesia; tujuh Pimpinan Wilayah, 30 Pimpinan Daerah, dan 230 Pimpinan Cabang, ditambah satu cabang Persis di Singapura (lihat lampiran *Ibid.*).

Pengembangan kegiatan Persis di bidang sosial dilengkapi dengan pembentukan badan-badan pelayanan sosial dan keagamaan. Antara lain untuk pelayanan serta bimbingan haji dan umrah dilakukan melalui kelompok bimbingan haji bernama *Qornul Manazil*. Lembaga ini sampai tahun 2000 telah membimbing sebanyak 7.435 orang, sedangkan untuk bimbingan haji dan umrah khusus diselenggarakan melalui Yayasan Karya Imtaq. Selain itu, Persis juga mendirikan beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, Rumah Yatim dan Rumah Sakit Islam (Anas, 2015 :11).

Demikian halnya dengan fenomena sosial-politik kontemporer dapat diperhatikan dari komunikasi politik Persis menghadapi situasi politik Indonesia. Seiring cita-cita dan tujuan Persis, yaitu terlaksananya syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan berdasarkan kepada Alquran dan as-Sunnah, maka partisipasi Persis dalam bidang politik dilakukan dengan mengarahkan orientasi politik anggota organisasi ini agar tidak melepaskan dan melupakan idealisme, cita-cita, dan tujuan organisasi dalam aktivitas mereka di dunia politik (Nurhasanah, 2018: 83). Salah satu implementasi atas cita-cita politik tersebut, Persis menunjukkan sikapnya seiring dengan dinamika politik di Indonesia. Sebagaimana terjadi pada Pemilu 2014, kehadiran partai-partai politik Islam yang berbeda-beda, telah mendorong Persis untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara beragam. Keikutsertaan anggota Persis dalam kancah politik diharapkan dapat memberikan implikasi dalam kehidupan jamaah Persis (*Ibid.*, 90)..

#### **D. Pengembangan Pendidikan dan Dakwah**

Persis semenjak awal berdirinya lebih menonjolkan identitas perjuangannya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Pembentukan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat, telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Persis sejak

sebelum kemerdekaan Indonesia melalui lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1930 didirikan Taman Kanak-Kanak dan sekolah dasar (HIS), kemudian sekolah Mulo pada tahun 1931, dan sebuah Sekolah Guru pada tahun 1932. Semua jenjang pendidikan tersebut diselenggarakan di kota Bandung, sedangkan di kota lain seperti Garut dan Tasikmalaya dapat dibangun sekolah-sekolah HIS Persis sejak tahun 1938 (Federspiel, 1970: 19).

Selain pendidikan umum tersebut di atas, Persis menyelenggarakan pendidikan khusus keagamaan melalui lembaga pesantren. Pada tahun 1935 didirikan “Pesantren Persatuan Islam” di Bandung di bawah asuhan Hasan Hamid dan E Abdurrahman. Pesantren ini diselenggarakan dalam dua jenjang pendidikan: Pertama, disebut *Pesantren Kecil*, yang dipersiapkan untuk pendidikan anak-anak dengan pelaksanaannya pada sore hari. Untuk pertama kalinya, *Pesantren Kecil* telah dapat menampung peserta didik sekitar 100 anak. Kedua, *Pesantren Besar* yang dipersiapkan untuk pendidikan remaja, yang didirikan atas prakarsa A. Hassan pada bulan Maret 1936. Penyelenggaraan pendidikan pesantren jenjang menengah ini bertujuan membentuk kader-kader mubaligh, pengajar, dan pembela Islam. Untuk pertama kalinya, santri didik di *Pesantren Besar* sebanyak 40 orang. Mereka mendapat pengajaran dan bimbingan agama serta masalah-masalah keislaman. Selain langsung dalam bimbingan A. Hassan sebagai guru utama, di pesantren tersebut juga aktif memberikan pengajaran dan bimbingan para tokoh Persis lainnya seperti E. Abdul Kadir dan Muhammad Natsir (*Risalah*, 1962: 10-11).

Peranan *Pesantren Besar* sebagai lembaga andalan Persis dalam mempersiapkan kader pendidik dan mubaligh. Meskipun A. Hassan, selaku pembina utama pesantren tersebut, pindah ke Bangil Jawa Timur pada bulan Maret 1940, *Pesantren Besar* itu tetap dikembangkan di sana. Bahkan sebanyak 25 orang santri yang masih menempuh pelajaran *Pesantren Besar* di kota Bandung juga ikut pindah ke Bangil. Pengembangan lebih lanjut dilakukan A. Hassan dengan mendirikan Pesantren Besar Khusus Puteri pada bulan Februari 1941. Jenjang pesantren ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada kader putri Persis (Mughni, 1980: 71). Selanjutnya dua pesantren besar di Bangil itu lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Putera dan Pesantren Puteri, dan terus dalam pengasuhan A. Hassan hingga wafatnya pada tanggal 10 Nopember 1958 (Djaya, 1980: 33). Kedua pesantren tersebut menjadi simbol pendidikan kader serta perjuangan Persis, sekalipun dalam situasi sosial-politik

yang tidak kondusif akibat pendudukan Jepang maupun perang kemerdekaan dan situasi politik di awal kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, perkembangan lembaga pendidikan Persis di Bandung mengalami perubahan. Sejak kepindahan A. Hassan, jenjang pendidikan *Pesantren Kecil* masih diselenggarakan di kota ini, sedangkan fasilitas *Pesantren Besar* diubah penggunaannya untuk pendidikan Persis dalam jenjang *HIS*, *Schakel*, *Mulo* dan *Kweekschool* (Risalah, Djuni 1962: 10). Meskipun demikian semua jenjang pendidikan tersebut tidak bertahan lama, karena ditutup oleh pemerintah Jepang. Lembaga pendidikan Persis selanjutnya berubah nama menjadi Pesantren Ibtidaiyah pada tahun 1942, atas prakarsa pimpinan Persis masa itu, yaitu M. Rusyad Nurdin, Qamaruddin, dan Abdullah, meneruskan. Namun pesantren ini hanya berlangsung selama beberapa tahun saja, karena suasana tidak kondusif akibat perang kemerdekaan. Setelah keadaan sosial kembali pulih, pada tahun 1948 ustadz Sudibja membuka kembali Pesantren Ibtidaiyah di jalan Kalipah Apo Belakang No. 5 Bandung. Pesantren Persis ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan mengalami kemajuannya pada masa kepemimpinan E. Abdurrahman dan Abdullah. Mereka berusaha mengembangkan pesantren tersebut dengan penyempurnaan sistem pendidikan dan pengelolaan pesantren yang lebih baik (*Ibid.*, 11).

Upaya peningkatan pendidikan pesantren Persis terus dilakukan oleh E. Abdurrahman dan Abdullah, yaitu dengan menambah tingkat Tsanawiyah pada tahun 1950. Dalam jenjang pendidikan menengah ini diberikan pelajaran agama dan umum, yaitu dengan pembagian 60% pelajaran agama Islam dan 40% pelajaran umum. Untuk mata pelajaran keagamaan meliputi : Hadits dan Ilmu Hadits (*Musthalahul Hadits*, *Rijalul Hadits*, dan *Riwayat Hadits*), Ilmu Hukum (*Ushul al-Fiqh* dan *Fiqh*), dan Bahasa Arab (*Nahwu Sharaf*, *Balaghah*, *Bayan*, *Badi*, dan *Ma'any*). Buku-buku pelajaran yang dipergunakan untuk pelajaran agama tersebut adalah sebagian besar berbahasa Indonesia, terutama karya-karya A. Hassan, sedangkan sebagian kecil lainnya adalah buku-buku berbahasa Arab. Adapun pelajaran umum yang diberikan pada jenjang Tsanawiyah ini meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Aritmetika, Geografi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, dan Ilmu Pendidikan (Anas, 2015, 150).

Usaha Persis dalam pembinaan serta pengembangan pesantren tingkat Tsanawiyah tersebut juga dilakukan dengan memperbaiki sarana pendidikan. Tempat penyelenggaraan pendidikan Persis yang semula hanya menempati sebuah gedung hasil

renovasi sebuah gudang sebagai wakaf dari K.H. Muhammad Zamzam (pendiri Persis) di jalan Pajagalan No.77; kemudian dikembangkan dengan membangun kampus Pesantren Persis di jalan Pajagalan No. 22-26 pada tahun 1952, dan pada tahun 1955 didirikan Masjid Persis di atas tanah wakaf dari K.H. Anang Thajib, seorang pengusaha asal Palembang. Pembangunan semua sarana tersebut dapat dilaksanakan atas biaya yang didapatkan dari hasil usaha Persis khususnya melalui pimpinan bagian pendidikan, sumbangan dari anggota Persis dan para dermawan (*Risalah*, 1962: 11). Demikian pendidikan Persis terus dikembangkan melalui pesantren tersebut, bahkan guru dan mubalig lulusannya di kemudian hari berperan mengembangkan pesantren dan dakwah di daerah-daerah.

Selain Ibtidaiyah dan Tsanawiyah sebagaimana dijelaskan di atas, pesantren Persis sejak tahun 1955 juga mulai menyelenggarakan tingkat *Tajhiziyah* dan *Mu'allimin*. Pesantren tingkat *Tajhiziyah* merupakan tingkat pendidikan persiapan keagamaan yang diikuti oleh peserta didik tamatan Ibtidaiyah sebelum memasuki jenjang Tsanawiyah. Adapun *Mu'allimin* merupakan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Tsanawiyah, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi *ustadz* (guru) pesantren dan mubalig. Dua jenjang pendidikan ini pada awalnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar enam minggu dalam tiga bulan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan lebih banyak bidang keagamaan, ditambah sekitar Ilmu Pengetahuan Alam (Mulyanudin, 1991: 80). Angkatan pertama santri *Mu'allimin* telah dapat diarahkan menjadi tenaga guru di pesantren Persis, tetapi kemudian mereka juga mendirikan pesantren-pesantren Persis di daerah asalnya, seperti di Ciparay Kabupaten Bandung, di daerah Sukabumi, dan di Pamanukan Kabupaten Subang. Di masing-masing daerah itu, mereka dibantu oleh mubalig dari bagian tablig Persis, sehingga mereka aktif dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren dan kegiatan-kegiatan pengajian di masyarakat.

Peningkatan kualitas lulusan pesantren Persis dilakukan antara lain dengan mendorong studi lanjut ke luar negeri. Pada bulan Oktober 1955 dimulai pengiriman alumni pesantren *Mu'allimin* Persis ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (*Ibid.*, 88). Setelah mereka kembali di tanah air dapat berkiprah sebagai tenaga pengajar di pesantren-pesantren Persis, ataupun mereka membuka pesantren di daerah asalnya. Karena itu, pada tahun 1963 Pesantren Persis tercatat sebanyak 20 pesantren yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan jumlah siswa sebanyak 6000 orang. Semenjak itu Persis juga menyelenggarakan beberapa pendidikan khusus untuk

guru dan mubalig, disamping membina dua jenis pesantren besar yang berada di Bangil (Federspiel, 1970: 125). Demikian pendidikan Persis di masa-masa selanjutnya mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga hingga tahun 1980 tercatat pesantren Persis telah mencapai jumlahnya sebanyak 78 pesantren yang tersebar di berbagai daerah (Mulyanudin 1991 : 88).

Selain pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan formal seperti tersebut di atas, Persis juga sering menyelenggarakan pendidikan non-formal, khususnya dalam bentuk pesantren kilat. Pendidikan serupa ini mulai tumbuh sejak 1980-an, ketika itu juga marak dilaksanakan di sejumlah pesantren di Jawa Barat, dengan sasaran peserta didik atau santrinya adalah siswa-siswa sekolah umum. Pesantren kilat biasanya diselenggarakan pada liburan sekolah selama bulan Ramadhan. Penyelenggaraan pesantren kilat ini bertujuan memenuhi kebutuhan pemuda ataupun siswa terhadap pengetahuan keagamaan. Penyelenggaraan pesantren kilat sering pula dilaksanakan di luar lingkungan pesantren Persis, seperti di panti-panti asuhan, sekolah-sekolah luar biasa, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Bahkan pada tahun 1961 Persis pernah menyelenggarakan pesantren kilat di sekolah Teknik Penerbangan Indonesia atas permohonan komandannya. Kegiatan ini dipimpin oleh Yunus Anis dari Pimpinan Pusat Pemuda Persis (*Ibid.*).

Gerakan Persis dalam bidang pendidikan dan dakwah, sebagaimana terlihat dari usaha dan pengelolaan bidang-bidang tersebut sejak tahun 1963, dapat dikatakan Persis telah berhasil mengembangkan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan melalui cabang-cabang Persis hingga akhir masa Orde Baru. Seperti halnya dilaporkan pada Mukhtamar Kesebelas Persis di Jakarta tahun 1995, Persis telah memiliki sebanyak 436 unit pesantren dan lembaga pendidikan lain dari berbagai tingkatan, yang secara rinci disebutkan sebagai berikut : 48 unit tingkat Raudhatul Athfal (Taman Kanak-Kanak), 285 unit tingkat Diniyah Ula/Ibtidaiyah, 50 unit Tajhiziyyah, 32 unit Tsanawiyah/Diniyah Wustha, 19 unit Muallimin/Aliyah, dan 4 unit tingkat Al-Jami'ah (Perguruan Tinggi). Jenjang pendidikan tinggi khususnya terdiri dari: Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI), Program Diploma Dua Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) yang bernaung di bawah STAIPI, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persis, dan Lembaga Tinggi Pendidikan Bahasa Arab (Anas, 2015: 164).

Adapun gerakan Persis dalam bidang tablig atau dakwah selalu dilakukan dalam rangka pemurnian agama Islam. Pengembangan dakwah Persis, baik dilakukan secara lisan ataupun tulisan, bertolak dari semangat untuk menegakkan faham kembali kepada Alquran dan Sunnah, dan selalu dikembangkan dalam seruan untuk membasmi *bid'ah*, *khurafat*, *takhayul*, dan *syirik* (*Ibid.*, 144). Gerakan dakwah dalam bentuk seruan keagamaan tersebut dilakukan para mubalig Persis ke hampir semua wilayah provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara sampai ke Sorong Irian Jaya. Demikian pula dakwah Persis semacam itu dilakukan ke luar negeri dilakukan seperti: Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, negara-negara Islam Timur Tengah, dan beberapa kota di Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, dan Australia. Selain itu, termasuk dakwah Persis secara internasional, misalnya partisipasi mubalig Pusat Pimpinan Persis dalam pertemuan *Rabitah 'Alam Islami* dan kegiatan Badan Pelayanan Haji *Qornul Manazil* Persis yang menggabungkan anggota jama'ah haji dari Mesir, Jedah, Jerman Barat, dan Australia (Laporan PP. Persis, Mukhtamar X, 1990., dalam *Ibid.* 145).

#### **E. Kesimpulan**

Label yang diberikan kepada Persis sebagai organisasi Islam pembaru yang bercorak pemurnian dengan prinsip kembali kepada Alquran dan Sunnah tetap berlaku sampai sekarang. Karena itu dinamika Persis dalam gerakan dan usaha pembaruan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, dalam pengembangan pemikiran keislaman, Persis terus berusaha melakukan pemurnian bidang *ibadah* dan *muamalah*. Dua bidang keagamaan ini selalu dikaji sesuai adanya persoalan dan kebutuhan masyarakat aktual. Dengan tetap merujuk pada produk pemikiran tokoh-tokoh Persis terahulu, pengkajian keagamaan dilakukan secara kelembagaan, melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berubah nama menjadi Dewan Hisbah Persis. Dewan inilah yang membahas dan mengkaji berbagai persoalan keagamaan itu secara intensif, seperti masalah hukum keluarga, ekonomi, dan masalah sosial lainnya.

*Kedua*, tentang orientasi sosial-politik. Semenjak awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh Persis berjuang menegakkan prinsip serta ideologi Islam untuk kehidupan politik dan negara. Ide-ide politik Islam banyak dikemukakan para tokoh Persis sebagai antitesa terhadap pemikiran-pemikiran nasionalis sekuler. Penyaluran ideologi Islam dikembangkan Persis melalui partai Masyumi pada periode Orde Lama, sedangkan pada

masa Orde Baru tidak secara langsung menunjukkan afiliasi politiknya terhadap partai tertentu, meskipun secara aspiratif Persis mendukung Parmusi, kemudian partai bernaifaskan Islam seperti PPP. Sementara itu, Persis pada era Reformasi menegaskan sikap politiknya secara independen, sekalipun jamaahnya tetap mengutamakan partai Islam, khususnya PBB.

*Ketiga*, pengembangan pendidikan dan dakwah merupakan prioritas gerakan Persis pada masa kontemporer. Orientasi pendidikan yang dikembangkan Persis terpusat kepada sistem pesantren, tetapi di dalamnya juga dikembangkan dan dibuka sekolah-sekolah keagamaan secara formal. Demikian pula sistem pembelajaran pada sekolah-sekolah Persis tersebut dikembangkan dengan memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum. Karena itu, gerakan pendidikan Persis pada umumnya memberikan kontribusi kepada pembentukan ulama, cendekiawan muslim, mubalig, dan guru agama. Sumbangsih pendidikan tersebut pada gilirannya sangat mendukung gerakan Persis dalam bidang dakwah, yang berorientasi kepada usaha-usaha pemurnian Islam, sebagaimana dakwah semacam itu menjadi penciri gerakan Persis sejak awal beridirinya hingga dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Abdurahman, Dudung, 1988. *Persatuan Islam Gerakan dan Pemikirannya di Indonesia 1923-1958*. Yogyakarta: Skripsi IAIN Sunan Kalijaga.
- \_\_\_\_\_, 2019. "Pemikiran Islam Murni Ahmad Hassan", dalam Muh Wildan, ed., *Tokoh-tokoh Muslim Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press.
- Abbas, Rafid, 2016, "Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6, Nomor 1, April 2016; ISSN 20890109.
- Achjadilaga, Undang bin dan Abdullah Yusof, "Role of Islamic Religious Union (Persis) Bandung in Implementation of Islamic Education", *Journal al-Muqaddimah*, vol. 6(1), Jan-Jun 2018.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendi, 1986. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Amin, Shiddiq, 2005. *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung : Tafakkur.
- Anas, Dadan Wildan, 1997. *Yang Da'i Yang Politikus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_, 2000. *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan PP. Pemuda PERSIS.
- \_\_\_\_\_, dkk., 2015. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang Selatan: Amana Publishing.
- Anshary, M. Isa, 1953. *Revolusi Islam*. Surabaya: Hasan Aidid.
- \_\_\_\_\_, 1954. *Islam dan Nasionalisme*. Bandung: PP Persatuan Islam.
- \_\_\_\_\_, 1958. *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*. Bandung: PP Persatuan Islam
- Boland, B.J., 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Terj. Garafiti Pers. Jakarta: Grafiti Press,
- Djaya, Tamar, 1980. *Riwayat Hidup A. Hassan*. Jakarta: Mutiara.
- Fauzan, Pepen Irpan, Ahmad Khoirul Fata, 2019. "Portraying Political Polarization In Persatuan Islam In The Case Of Mohamad Natsir Vs Isa Anshari", *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, Vol. 3 No. 2 July-December 2019.
- Federspiel, Howard M., 1970. *Persatuan Islam: Islamic Reform In Twentieth Century Indonesia* ( New York: Cornel University.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Persatuan Islam Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terjemahan Yudian W. Asmin, dan H. Afandi Mochtar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hassan, A., 1980. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Jilid I-III. Bandung: CV Dipenogoro,
- \_\_\_\_\_, 1984. *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: LP3EB.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Pengajaran Shalat*. Bangil: Persatuan.
- Hasan, H. Chalidjah. 1990. *Persatuan Islam dan Pembaharuannya*. Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati,.
- Maarif, Ahmad Syafi'I, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Masruhan, 2019. "The Unprecedented Contextual Interpretation of The Misogynic Hadith at The Reformist Persis Pesantren in Bangil" *Journal Of Indonesian Islam*, Volume 13, Number 02, December 2019.
- Mughni, Syafiq A, 1980. *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mulyanudin, Asep (1991), *Peranan Persatuan Islam dalam Membendung Pengaruh Komunisme terhadap Masyarakat Muslim Indonesia 1950-1965*, Bandung, IAIN Bandung.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.



\_\_\_\_\_. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

Nurhasanah, Nunung, 2018, “Pesan Komunikasi Politik Persis Dalam Pemilu Tahun 2014”, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398, Vol. 3, No. 4 April 2018.

Persis, 1957. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretariat PP. Persis.

\_\_\_\_\_, 1968. *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: Sekretaris PP. Persis.

\_\_\_\_\_, 1984. *Tafsir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan Islam*. Bandung : Pusat Pimpinan Persis.

\_\_\_\_\_, *Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili*. Persis: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010.

*Risalah*, 1962. No. SI-73. Bandung : PP Persatuan Islam.

Rohman, M. Taufiq, 2018. Beni Ahmad Saebani, “Membangun Gerakan Inklusivisme Model Jamaah Persatuan Islam”, *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Sar'an, H. Eman, 1988. “Sejarah Organisasi Persatuan Islam”, dalam *Tamaddun*, Bandung, tp.

Soekarno, 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Djakarta : Panitia Penerbit.

Umar, Salim, 1995. *Persatuan Islam Pembaharuan dan Pengaruhnya di Jawa Barat*, Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.